



DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

BUKTIKAN KOTA YOGYA MAMPU MANDIRI
Kaji Ulang B2B Pengelolaan Sampah

YOGYA (KR) - Rencana Pemkot Yogya yang akan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan sampah mendapat sorotan. Upaya 'Business to Business' (B2B) tersebut bahkan didesak agar dikaji ulang atau justru diurungkan.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogya Sigit Wicaksono, menilai persampahan merupakan urusan vital karena menyangkut hajat hidup masyarakat.

"Pemkot seharusnya bisa mandiri. Kenapa harus melibatkan swasta dan merancang B2B. Jangan terjebak dengan swasta. Pola pikirnya kok pendek sekali," tegasnya.

Menurutnya, karena sudah menjadi hajat masyarakat maka seterusnya akan selalu berhadapan dengan sampah. Dengan demikian Pemkot seharusnya bisa lebih serius mengelola hal tersebut. Bentuk keseriusan itu dengan mewujudkan perusahaan atau badan usaha sendiri. Seperti halnya urusan perbankan, Pemkot memiliki Bank Jogja. Urusan air, dilayani melalui PDAM Tirtamarta. Begitu pula urusan sampah seharusnya ada badan usaha tersendiri.

Konsep itu, imbuh Sigit, harus mulai dipersiapkan secara matang dan tidak sepotong-sepotong. Apalagi persoalan hilirisasi persampahan sebetulnya lebih mengedepankan teknologi. "Perusahaan atau badan

Sigit Wicaksono
Fraksi Partai NasDem



usaha bicaranya bukan soal keuntungan. Kita harus menyiapkan anggaran untuk itu. Mahal tidak apa-apa tetapi itu kan akan terus kita gunakan. Masyarakat selama ini sudah patuh membayar pajak, seharusnya diimbangi dengan pelayanan yang prima," urainya.

Ketika persoalan hajat itu diserahkan ke pihak swasta, maka kemandirian akan sulit diwujudkan. Apalagi jika kelak terjadi masalah darurat sampah, jangan sampai justru pemerintah lepas tangan dan mendesak masyarakat untuk mandiri. "Selama ini kan masyarakat selalu dituntut menghemat, menekan volume sampah, tapi kemudian masyarakat juga yang akhirnya dibebani," imbuhnya.

Oleh karena itu, Sigit berharap Pemkot mampu membuktikan jika mampu mandiri kelola sampah tanpa tergantung dengan swasta. Lahan terbatas bukan menjadi sandungan sepanjang ada kepastian dan ketegasan. Proses pembangunan badan layanan usaha maupun pengadaan teknologi untuk pengolahan sampah juga harus transparan agar masyarakat dapat mengawal.

"Sampah kan tidak sekali saja tapi seterusnya. Seharusnya negara hadir sendiri sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajibannya. Apalagi ini sudah menjadi kebutuhan dasar," katanya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005